

**STRATEGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
BUPATI BEKERJA DAN BERKANTOR DI KAMPUNG (BUJANG KAMPUNG)  
KABUPATEN SIAK TAHUN 2023**

**Oleh : Niken Fujia Lestari**  
**Pembimbing: Ben Hansel Notatema Zebua**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Program Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung (Bujang Kampung) adalah inisiatif Pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Program ini menawarkan layanan kesehatan gratis, termasuk dokter spesialis, namun menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya jenis dokter spesialis, waktu pelaksanaan terbatas, sosialisasi yang kurang efektif, dan anggaran yang tidak teralokasi dengan baik pada awal tahun. Program ini juga mendapat perhatian Ombudsman RI dan berhadapan dengan tingginya angka penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan teori strategi pemerintahan oleh Geoff Mulgan (2009) dengan indikator tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arah (*directions*), tindakan (*actions*), dan pembelajaran (*learning*). Penelitian ini menjelaskan strategi Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan Program Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung (Bujang Kampung) Kabupaten Siak tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Siak mengeluarkan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung). Beberapa strategi yang diterapkan yakni komunikasi intensif antar-instansi, optimalisasi anggaran melalui dana operasional ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD), serta peluncuran layanan kesehatan keliling "Siak Melesat". Pemerintah juga mengintegrasikan edukasi kesehatan, mendorong peran aktif perangkat kampung, dan menjalin kemitraan dengan perusahaan melalui CSR seperti PT BSP dan PT RAPP yang memberikan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Strategi baru mencakup pendekatan partisipatif, teknologi lokal, dan model pelayanan terpadu, dengan fokus pada inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

***Kata Kunci: Bujang Kampung, Kabupaten Siak, Pelayanan Kesehatan, Siak Melesat, Strategi Bupati dan Wakil Bupati***

**ABSTRAK**

*The regent working and having an office in the village (Bujang Kampung) program is an initiative of the Siak Regency Government to improve access and quality of health services in remote areas. This program offers free health services, including specialist doctors, but faces several challenges such as a lack of specialist doctors, limited implementation time, less effective outreach, and a budget that was not allocated well at the beginning of the year. This program has also received the attention of the Indonesian*

*Ombudsman and is dealing with high rates of diseases such as Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) and Acute Respiratory Infections (ARI).*

*This study uses a descriptive qualitative method, with the determination of informants using purposive sampling techniques, with the theory of government strategy by Geoff Mulgan (2009) with indicators of purpose, environment, directions, actions, and learning. This study explains the strategy of the Regent and Deputy Regent in implementing the Regent Working and Having an Office in the Village (Bujang Kampung) of Siak Regency in 2023.*

*The results of the study show that the Regent and Deputy Regent of Siak issued Regent Regulation No. 6 of 2024 concerning the Implementation of Public Services through the Bujang Kampung Program (Regents Working and Having Offices in Villages). Several strategies implemented include intensive communication between agencies, budget optimization through ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) operational funds, and the launch of the "Siak Melesat" mobile health service. The government also integrates health education, encourages the active role of village officials, and establishes partnerships with companies through CSR such as PT BSP and PT RAPP which provide Supplementary Food Provision (PMT) assistance. New strategies include a participatory approach, local technology, and an integrated service model, with a focus on innovation and continuous improvement.*

***Keywords: Bujang Kampung, Siak Regency, Health Services, Siak Melesat, Regent and Deputy Regent Strategy***

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Studi ini bertujuan untuk meneliti strategi Bupati dan Wakil Bupati dalam mengimplementasikan program Bujang Kampung, khususnya dalam sektor pelayanan kesehatan di Kabupaten Siak tahun 2023. Bupati dan Wakil Bupati memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif pada daerahnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, berbagai inovasi diterapkan untuk mengatasi kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, dan aksesibilitas layanan. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah Bujang Kampung, sebuah program pelayanan keliling yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi, kepala daerah memiliki kewenangan luas untuk mengelola

pembangunan dan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan (Indriyani, 2019; Rosramadhana & Simanjuntak, 2018). Desentralisasi menuntut pemerintah daerah menciptakan inovasi pelayanan publik yang efisien dan akuntabel (Silitonga et al., 2020). Inovasi ini ditujukan untuk menjawab tantangan lokal dengan solusi adaptif, seperti keterbatasan infrastruktur dan akses layanan yang tidak merata. Program Bujang Kampung merupakan bentuk inovasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil.

Bujang Kampung dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Kabupaten Siak yang luas dan akses layanan yang terbatas. Bupati Alfredri (2021–2025) menyampaikan bahwa pelayanan yang dekat dengan masyarakat akan lebih cepat diselesaikan (Arizal, 2022). Program ini sejalan dengan visi-misi Kabupaten Siak (Inforiau, 2022), serta menjadi bagian dari RPJMD 2021–2026 dalam rangka pemerataan pelayanan

dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Program ini diinisiasi melalui hasil studi tiru ke berbagai negara seperti Georgia, Azerbaijan, Turki, Dubai, dan Singapura oleh Bupati dan Wakil Bupati Siak (periode 2021–2025). Di negara-negara tersebut, pelayanan publik dinilai mudah dijangkau, gratis, dan dekat dengan masyarakat. Visi-misi Bupati Siak menyebutkan bahwa pembangunan harus bersifat inklusif dan pelayanan harus prima, khususnya pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Inovasi ini dilaksanakan setiap hari Jumat oleh Wakil Bupati bersama ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) terkait sejak tahun 2022. Program ini telah mendapat apresiasi dari Ombudsman RI sebagai salah satu dari dua inovasi pelayanan publik terbaik nasional (Riautelevisi.com, 2023). Program Bupati bekerja dan Berkantor di Kampung (Bujang Kampung) ini telah ditetapkan berdasarkan beberapa keputusan, yaitu:

1. Keputusan Bupati Siak Nomor 764/HK/KPTS/2021 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bupati Siak Tahun 2022
2. Keputusan Bupati Siak Nomor 207/ HK/ KPTS/ 2022 tentang Penetapan Kegiatan Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bupati Siak Tahun 2022
3. Keputusan Bupati Siak Nomor 790/ HK/ KPTS/ 2022 tentang Penetapan Tim Pelaksana Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bupati Siak Tahun 2023

Dalam implementasinya, program ini melibatkan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak perencanaan hingga evaluasi, termasuk

jadwal rapat, pendistribusian izin, dan koordinasi grup *WhatsApp*. Persiapan teknis dilakukan H-2 dan layanan dilaksanakan dengan sistem jemput bola. Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan dan observasi lapangan. Pelayanan diberikan secara gratis dalam 10 bidang, yakni kependudukan, sosial, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kesehatan, data kependidikan, perpajakan dan retribusi, pengadilan agama, keagamaan, pertanahan, dan pustaka keliling.

Seluruh jenis layanan ini tidak diurutkan berdasarkan prioritas, melainkan disusun secara administratif. Hal ini menegaskan komitmen pada prinsip pemerataan akses. Program ini telah direplikasi di beberapa daerah seperti Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Bangka Selatan sejak 2024.

Dalam pelaksanaan layanan kesehatan, jumlah tenaga medis terbatas. Hanya dua dokter spesialis (anak dan kandungan), satu dokter umum, dan mayoritas tenaga berasal dari bidan serta perawat puskesmas. Ketersediaan dokter spesialis tambahan sangat tergantung permintaan kampung, seperti yang terjadi di Kampung Dosan, Kecamatan Pusako.

Evaluasi formal program dilakukan oleh DPMK pada 24 Juli 2023 melalui survei kuesioner yang menghasilkan nilai kepuasan rata-rata 8 dari 10. Namun, jumlah responden masih terbatas ( $\pm 53$  orang). Respon di media lokal juga menunjukkan antusiasme, tetapi disertai kritik seperti antrean panjang, waktu terbatas, kurang tenaga, dan ketidaksesuaian jadwal dengan kegiatan warga. Masukan masyarakat menyoroti perlunya penambahan petugas, peningkatan frekuensi layanan, kolaborasi dengan BPJS dan Imigrasi, serta perluasan layanan. Kendala yang paling menonjol adalah keterbatasan SDM, sosialisasi yang tidak merata (hanya melalui *WhatsApp*), dan waktu pelayanan yang tidak fleksibel.

Data BAPPEDA Siak menunjukkan tantangan utama program Bujang Kampung

mencakup kurangnya tenaga dan anggaran. Kondisi ini menghambat penanganan penyakit menular yang sedang merebak, seperti ISPA dan DBD. Penyebaran informasi yang minim juga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap jenis dan prosedur layanan.

Program Bujang Kampung di tahun pertama pelaksanaannya mendapat sambutan positif terutama melalui layanan pengobatan gratis. Namun, efektivitas layanan kesehatan mulai dipertanyakan pada 2023 karena masih tingginya kasus penyakit menular. Provinsi Riau mencatat 31.093 kasus Inpeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan 1.742 kasus DBD (Wangge, 2024), Kabupaten Siak termasuk tiga daerah tertinggi kasus DBD (153 kasus dan dua kematian), meningkat dari 112 kasus pada 2022 (Media Center Riau, 2022). Selain itu, Inpeksi Saluran Pernapasan Atas ISPA juga tinggi di Siak bersama Pekanbaru, Dumai, dan Inhil, dengan jumlah kasus mencapai 41.705-54.480 kasus dalam periode 2022–2023 telah tercatat oleh Badan Pusat Statistik Siak. Padahal, Siak telah memiliki program layanan kesehatan keliling, namun tetap menjadi salah satu penyumbang kasus penyakit terbanyak (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Provinsi Riau, 2023).

Hal ini menjadi perhatian, sebab program Bujang Kampung dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai amanat Keputusan Bupati Siak tersebut. Keterbatasan sumber daya membuat pelayanan kesehatan kurang optimal, sehingga muncul kesenjangan antara idealitas dan realitas kebutuhan. Oleh karena itu, tantangan besar dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam menyediakan layanan kesehatan yang responsif dan efektif. Program belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan preventif, kuratif, dan edukatif secara menyeluruh. Edukasi mengenai PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) juga perlu ditingkatkan, khususnya di daerah

yang rawan wabah.

Pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (2). Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan kesehatan (Noer et al., 2021; Adi, 2015). Menurut Studwell dalam Haboddin dan Arswendi (2022), masyarakat membutuhkan pemerintah yang memahami kepentingan umum dan memberikan pelayanan terbaik.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik mengangkat judul “Strategi Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Program Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung (Bujang Kampung) Kabupaten Siak Tahun 2023”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Program Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung (Bujang Kampung) Kabupaten Siak Tahun 2023?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Menjelaskan Strategi Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Program Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung (Bujang Kampung) Kabupaten Siak Tahun 2023.

## **B. TINJAUAN TEORI**

Geoff Mulgan (2009) mendefinisikan strategi pemerintahan sebagai penggunaan sumber daya dan kewenangan publik secara sistematis untuk mencapai kepentingan umum. Berdasarkan pengertian ini, ia menguraikan indikator-indikator strategi pemerintahan ke dalam lima komponen utama, yaitu tujuan (*purposes*), lingkungan (*environments*), pengarahan (*directions*),

aksi (*actions*), dan pembelajaran (*learning*) (Muhammad, 2020). Berikut ini merupakan strategi pemerintahan oleh Geoff Mulgan (Mulgan, 2009):

- a. Tujuan (*Purpose*). Menurut Mulgan, pemerintah harus memahami alasan utama mereka bertindak. Ia menyatakan bahwa “*Purposes—why they should act in the first place: defining the compelling purposes which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities.*” Pemerintah harus dapat mendefinisikan tujuan-tujuan penting yang harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, aspirasi masyarakat serta kekhawatiran yang ada. Tujuan ini menjadi landasan utama dalam perumusan strategi agar sesuai dengan kondisi dan tuntutan publik.
- b. Lingkungan (*Environment*). Pemerintah juga harus memahami lingkungan dimana mereka akan mencapai tujuan tersebut. Mulgan (2009) menjelaskan bahwa “*where they are seeking to achieve their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done.*” Ini berarti bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan situasi saat ini dan masa depan serta kapasitas yang mereka miliki untuk melaksanakan strategi.
- c. Arah (*Directions*). Dalam merancang strategi, pemerintah harus memiliki arah yang jelas. Mulgan menyatakan bahwa “*Directions—what they want to achieve: the goals and outcomes that are desirable and achievable (which in the military take the form of the 'commander's intent' which is written at the top of any order), as well as their relative priorities*

*and sequencing.*” Ini berarti pemerintah harus menentukan hasil yang ingin dicapai, memastikan tujuan tersebut realistis, serta menyusun prioritas dan urutan pelaksanaannya secara sistematis agar sumber daya yang digunakan dapat efisien dan hasilnya maksimal. Dengan arah yang jelas, kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan terarah.

- d. Tindakan (*Actions*). Setelah menetapkan tujuan dan arah, langkah selanjutnya adalah sebuah tindakan. Mulgan (2009) menjelaskan bahwa “*Actions—how they are to achieve their goals, with detailed strategies, policies, laws and programmes, as well as inspirational leadership to persuade others to commit to the cause. Together these aim to create public value.*” Artinya, pemerintah mencapai tujuan mereka melalui strategi, kebijakan, undang-undang, atau program yang konkret. Selain itu, kepemimpinan yang inspiratif juga diperlukan untuk membangun dukungan dan memastikan strategi dapat berjalan dengan baik.
- e. Pembelajaran (*Learning*). Strategi yang baik memiliki pembelajaran. Mulgan menyatakan bahwa “*Learning—systems for understanding not just which actions did or didn't work but also whether there's a need to rethink purposes, analyses and chosen directions.*” Pembelajaran dalam strategi pemerintahan bukan hanya tentang mengevaluasi apakah suatu tindakan berhasil atau gagal. Lebih dari itu, pembelajaran berarti pemerintah harus terus berpikir apakah tujuan awal, cara menganalisis masalah, dan arah kebijakan masih relevan atau perlu diperbaiki. Jika ada perubahan situasi atau cara yang lebih efektif,

maka strategi harus disesuaikan agar tetap bermanfaat bagi masyarakat.

### **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Creswell, J. W menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Di mana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisis data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci (Rukin, 2021).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang men-jadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Jaya, 2020).

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Siak adalah daerah inovatif dengan program yang hanya ada dua di Indonesia saat (tahun 2022) itu yakni di Banyuwangi dan Kabupaten Siak itu sendiri, selain itu pada tahun 2023 Kabupaten Siak adalah salah satu dari tiga daerah pengidap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) (kasus DBD meningkat di Siak tahun 2023 sebesar 41.705-54.480) dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) tertinggi di Provinsi Riau, padahal pada tahun 2022 program Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung dengan sepuluh jenis layanannya khususnya pada pelayanan kesehatan masyarakat telah berjalan untuk memberikan edukasi serta perobatan dan

layanan kesehatan lainnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 cara yakni wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian yang berupa dokumen, artikel jurnal, buku, gambar, website dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Program Bujang Kampung merupakan inisiatif yang lahir dari gagasan Bupati Siak, Drs. H. Alfredri, M.Si, dan Wakil Bupati Siak yakni H. Husni Merza, B.BA, M.BA sebagai solusi atas keterbatasan akses pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan. Bupati dan Wakil Bupati Siak telah berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menemukan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh layanan. Kampung-kampung yang jauh dari pusat layanan menjadi hambatan, sementara masyarakat sering kali tidak memiliki biaya atau waktu untuk bepergian ke pusat pengurusan pelayanan. Dari pengamatan inilah lahir gagasan untuk menghadirkan layanan langsung ke masyarakat melalui pendekatan jemput bola, di mana pemerintah yang mendatangi masyarakat, bukan sebaliknya.

Penamaan Bujang Kampung, yang merupakan akronim dari Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung, mencerminkan filosofi dasar program ini. Untuk nama “kampung” yang berarti desa merupakan warisan Melayu dari zaman Kerajaan Siak yang digunakan hingga saat ini. Meskipun namanya mengacu pada peran Bupati, dalam pelaksanaannya program ini tetap melibatkan Wakil Bupati, Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan berbagai instansi lainnya. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ide awalnya berasal dari Bupati, program ini adalah bagian dari kerja kolektif pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2023, Bupati dan Wakil Bupati Siak tersebut telah melakukan perubahan baru, yakni dengan strategi baru yang diterapkan dalam mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat, yang akan dipaparkan pada paragraf di bawah ini.

**Gambar 1. Poster Program Bujang Kampung Kabupaten Siak**



Sumber: Instagram @prokopim\_siak

### 1. Tujuan (Purpose) Program Bujang Kampung

Menurut Mulgan (2009), pemerintah harus memahami alasan utama mereka bertindak. Pemerintah harus dapat mendefinisikan tujuan-tujuan penting yang harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, aspirasi masyarakat serta kekhawatiran yang ada. Tujuan ini menjadi landasan utama dalam perumusan strategi agar sesuai dengan kondisi dan tuntutan publik.

Pemerintah Kabupaten Siak menginisiasi pelayanan kesehatan dalam program Bujang Kampung sebagai bentuk upaya mendekatkan layanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat di kampung-kampung yang jauh dari fasilitas medis. Selama ini, masyarakat di daerah terpencil sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai karena keterbatasan akses, tenaga medis, dan sarana prasarana yang terbatas. Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati Siak merasa perlu untuk menghadirkan tenaga medis, termasuk dokter spesialis, langsung ke kampung-kampung agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mereka butuhkan tanpa harus pergi ke pusat kota. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Wakil Bupati Siak Bapak H. Husni Merza, BBA., MM periode 2021-2025, yang menyatakan bahwa:

*“Jadi sebetulnya kan pemerintah Kabupaten Siak tu secara umum tu pengen mendekatkan pelayanan yang biasanya masyarakat itu bisa dapatkan di tingkat kabupaten ... nah mungkin kalau cuma di desa kan paling-paling tinggi ada Pustu (Puskesmas Pembantu) atau Polindes nah Puskesmas pun hanya ada di tingkat kecamatan. Nah, ketika kita hadir dengan program Bujang Kampung itu biasanya kita hadir dengan dokter spesialis.”* (Wawancara 20 Februari 2025).

Tentunya hal ini selaras dengan program Bujang Kampung yang diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunan di daerah-daerah terpencil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan mudah diakses bahkan gratis (Pemerintah Kabupaten Siak, 2024). Secara keseluruhan, alasan utama dari inisiasi program ini adalah pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup

masyarakat di Kabupaten Siak.

Program Bujang Kampung yang digagas untuk mendekatkan layanan kesehatan ke kampung-kampung dan bertujuan meningkatkan akses medis serta kesadaran masyarakat, strategi tersebut serupa di Kabupaten Karimun dalam upaya mencapai *Universal Health Coverage* (UHC). Penelitian desa (Lestari & Puspari, 2023) menemukan bahwa pemerintah desa berhasil mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tinggi melalui pendataan individu tidak tercapai, pelibatan aktif kader posyandu, bidan desa, serta penyuluhan langsung di desa-desa. Selain itu, studi bibliometrik (metode kuantitatif) oleh (Alifah Wilanda et al., 2024) menegaskan bahwa intervensi pemerintah berbasis komunitas di wilayah terpencil, seperti penyediaan tenaga medis, pelatihan, serta penggunaan teknologi sangat efektif meningkatkan akses layanan primer. Pendekatan ini mendukung argumen bahwa intervensi jemput bola di tingkat lokal dapat mendorong pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Siak.

Selanjutnya, agar program ini benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal yang dilakukan yakni mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung serta melakukan evaluasi terhadap tantangan yang ada di lapangan. Proses ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kampung, survei kebutuhan kesehatan, serta analisis kondisi di setiap wilayah sebelum menentukan layanan yang akan dibawa dalam program Bujang Kampung.

Setiap pelaksanaan program Bujang Kampung selalu diawali dengan komunikasi antara Bupati ataupun Wakil Bupati Siak dan pihak kampung untuk memahami kebutuhan spesifik masyarakat di wilayah tersebut. Dengan cara ini, program dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Siak

tidak hanya menetapkan kebijakan berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat, melalui feedback memperkuat prinsip bahwa pelayanan kesehatan harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi lokal.

## 2. Lingkungan (*Environment*) Program Bujang Kampung

Pemerintah juga harus memahami lingkungan dimana mereka akan mencapai tujuan tersebut. Mulgan (2009) menjelaskan pemerintah perlu mempertimbangkan situasi saat ini dan masa depan serta kapasitas yang mereka miliki untuk melaksanakan strategi. Interaksi antara kondisi yang ada dan kemampuan yang dimiliki akan membantu pemerintah menentukan langkah yang tepat dalam menjalankan sebuah program.

Untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dan mengantisipasi perubahan, pemerintah dapat membuat keputusan yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga bagi masa depan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan Wakil Bupati Siak periode 2021-2025 yakni H. Husni Merza, BBA., M.M selaku pengarah pada program ini, bahwa:

*“Saya memahami bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan situasi saat ini dan masa depan dalam membuat kebijakan dan keputusan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Contohnya adalah program Bujang Kampung yang kami laksanakan di Kabupaten Siak. Program ini sangat dibutuhkan saat ini karena Kabupaten Siak memiliki luas wilayah yang besar dan banyak kampung yang jaraknya cukup jauh dari*

pusat kabupaten/kota.”  
(Wawancara 20 Februari 2025).

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa program ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Siak, karena dapat membantu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dan menghemat biaya masyarakat, serta memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Program Bujang Kampung yang gratis saat ini, dapat menghemat pengeluaran masyarakat, baik dari segi pengeluaran pengobatan dan biaya transportasi, sehingga masyarakat dapat menggunakan dana mereka untuk kebutuhan lainnya. Untuk situasi masa depan, tentunya program ini akan berkembang lebih baik, dan dapat diterapkan pada pembangunan-pembangunan di kampung-kampung nantinya.

Dalam penyelenggaraan program Bujang Kampung, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam aspek sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur (fasilitas) yang berkaitan dengan anggaran program. Meskipun tenaga medis yang terlibat dalam program ini cukup memadai, tetap ada tantangan dalam menyediakan pelayanan pelaksanaan program. Beberapa kampung yang memiliki penduduk yang padat membutuhkan tenaga kesehatan yang lebih banyak, namun ketersediaan tenaga medis sulit ditambah mengingat penggunaan anggaran yang harus sesuai dengan penganggaran yang dimiliki dan hal ini tidak bersifat darurat, masyarakat diharapkan dapat bersabar untuk mengantri.

Selanjutnya, dari sisi anggaran yakni pada awal pelaksanaan program, alokasi dana masih belum maksimal. Namun setelah tahun pertama berlangsung, anggaran mulai disiapkan dengan lebih baik oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni menggunakan dana operasional lapangan yang sudah dialokasikan sebelumnya. Hal

ini diungkapkan oleh Bapak T. Indraputra, S. STP., M.Si selaku Wakil Ketua pada program ini:

“Kalau dari segi anggaran, sudah dicukupi dengan anggaran masing-masing OPD. Itu mungkin di awal-awal Bujang Kampung tidak terlalu lancar, tapi di tahun berikutnya, 2023, itu kalau tidak salah saya, sudah punya anggaran mulai dari makanannya dan sebagainya.”  
(Wawancara 20 Februari 2025).

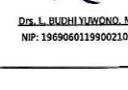
**Gambar 2. Anggaran Program Bujang Kampung Tahun 2023**

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
Orang / PP	Orang / Hari	120.000	0	Rp120.000	1 Orang / PP	Orang / Hari	120.000	0	Rp120.000	Rp0
Orang x 1 kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.050.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000	(Rp600.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.218.180.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.500.801.000	Rp282.621.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.876.926.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.183.112.900	Rp306.186.100

Siak Sri Indragiri, tanggal 01. November 2023  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

  
**Drs. H. MUHAMMAD SYAFI, M.Si**  
 NIP. 19690816199061002  
 Mengetahui,  
 D/PPD

  
**Drs. L. BUCHI YUMENDO, M.Si**  
 NIP. 196906011990021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Sumber: Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rincian Belanja dalam dokumen “Inovasi Bujang Kampung (Bupati dan Wakil Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung)” tahun 2024.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun di tahap awal terdapat kendala dalam alokasi dana, pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan penyesuaian agar program dapat berjalan lebih optimal di tahun-tahun berikutnya. Sehingga, total keseluruhan anggaran yakni Rp2.183.112.900 selama Januari-Desember tahun 2023 dst. Sebelumnya tahun 2022 berjumlah Rp1.876.926.800, sehingga mendapatkan tambahan sebesar

Rp306.186.100 atau setara dengan 16,3%.

Selain anggaran dan SDM, infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa kampung yang menjadi lokasi pelayanan memiliki akses jalan yang buruk dan terbatasnya gedung yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Akibatnya, dalam beberapa kesempatan, pemerintah harus menggunakan tenda sebagai tempat pelayanan sementara. Selain itu informasi pelaksanaan tidak menyebar secara merata akibat kurangnya fasilitas pelaksanaan program. Dalam hal ini, tim pelaksana program Bujang Kampung tentunya harus bijak dalam menggunakan strateginya supaya tetap dapat mencapai tujuan, sesuai yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yakni dr. Handry, M.KM selaku anggota pelaksana program, dan yang dituturkan oleh Bapak Drs. H. Alfedri, M.SI selaku Bupati Siak periode (2021-2025) yang menyatakan bahwa:

*“Kalau soal susah ya tergantung dalam kondisi kampung. Selama yang kita teliti, ya namanya kondisi suatu daerah ada yang mengalami memang kendala ke jalan ataupun geografisnya kurang baik. Itu memang jadi tantangan, sedangkan tujuan kita adalah untuk melayani masyarakat. Makanya Bujang Kampung ini dilakukan agar masyarakat yang berada di tempat yang susah diakses tetap bisa menikmati pelayanan kesehatan.”* (Wawancara 20 Februari 2025)

*“Tantangan itu kadang kan kurang terinformasikan dengan baik kepada masyarakat padahal kita sudah membuka ruang supaya masyarakat itu memanfaatkan pelayanan.”* (Wawancara 26

Maret 2025).

Meskipun terdapat kendala dalam infrastruktur, pemerintah tetap berupaya menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan pendekatan jempit bola. Metode pelayanan disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar dapat berjalan secara efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Siak terus melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pelaksanaan program Bujang Kampung agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan adalah kerja sama lintas sektoral dengan berbagai instansi, baik di tingkat kabupaten maupun dengan instansi vertikal.

### **3. Arah (Directions) Program Bujang Kampung**

Dalam merancang strategi, pemerintah harus memiliki arah yang jelas. Mulgan (2009) menyatakan pemerintah harus menentukan hasil yang ingin dicapai, memastikan tujuan tersebut realistis, serta menyusun prioritas dan urutan pelaksanaannya secara sistematis agar sumber daya yang digunakan dapat efisien dan hasilnya maksimal. Dengan arah yang jelas, kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan terarah.

Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan tujuan utama program Bujang Kampung dalam pelayanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan angka kesehatan masyarakat. Kemudian mengurangi ketimpangan layanan antara daerah perkotaan dan perkampungan, dengan ini diharapkan masyarakat Kabupaten Siak memperoleh akses kesehatan yang lebih mudah dan cepat, serta tidak mengeluarkan biaya. Selain itu, program ini juga berperan dalam mendorong pola hidup sehat dan pencegahan penyakit melalui edukasi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan-tujuan ini selaras dengan diungkapkannya oleh pernyataan

Dr. H. Fauzi Asni, M. Si selaku Ketua I program Bujang Kampung dan Drs. H. Muhammad Arifin, M. Si selaku Ketua II dalam program ini:

*“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, itu tidak bisa ditawar-tawar karena tanpa sehat kalian gak bisa kuliah ni kalian kuliah ni kalian sehat bahkan dibantu uang kuliah nya kalau sudah semester 3 keatas....”*  
(Wawancara Dr. H. Fauzi Asni, M. Si, 25 Februari 2025).

*“Untuk meningkatkan sdmnya masyarakat, mendekatkan pelayanan masyarakat, meringankan penyakit masyarakat, supaya masyarakat mudah untuk datang. Mendekatkan diri ke masyarakat untuk berobat. Jadi kalau dekat masyarakat termotivasi untuk melakukan pengecekan-pengecekan kesehatan dia. Berarti ini mendukung daripada untuk masyarakat. Untuk membantu masyarakat, untuk mendekatkan masyarakat dalam pelayanan...”*  
(Wawancara Drs. H. Muhammad Arifin, M. Si, 19 Februari 2025).

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Bujang Kampung dalam pelayanan kesehatan hadir untuk memperpendek jarak akses masyarakat terhadap layanan medis serta meningkatkan kesehatan masyarakatnya, tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui edukasi dan pencegahan penyakit. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat, sehingga tidak hanya bergantung pada pengobatan ketika sudah sakit, tetapi juga menerapkan pola hidup sehat untuk menghindari berbagai penyakit.

Kemudian, dalam menentukan

prioritas dan tahapan pelaksanaan program Bujang Kampung, Bupati dan Wakil Bupati Siak menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat dan evaluasi berkala. Pemilihan lokasi didasarkan pada laporan dari Kampung, data kesehatan daerah, serta identifikasi wilayah yang masih minim akses layanan kesehatan. Dengan pendekatan ini, Bupati dan Wakil Bupati Siak dapat memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

Hal ini sesuai dengan kurangnya tenaga medis yang dijelaskan dalam terbitan laporan-laporan berbentuk buku dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak setiap tahunnya, yang menggambarkan setiap kecamatan tidak memiliki dokter spesialis, bahkan yang seharusnya 1 dokter untuk 1000 penduduk juga tidak terpenuhi, contohnya Kecamatan Minas memiliki jumlah penduduk 31.509 jiwa pada tahun 2023, tapi hanya memiliki 5 dokter di kecamatannya, sebagai berikut:

**Gambar 3. Data Tenaga Medis di Kabupaten Siak Tahun 2023**

**Tabel 4.2.2** Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak, 2023  
*Number of Health Human Resources by Subdistrict in Siak Regency, 2023*

2023					
Kecamatan Subdistrict	Dokter Doctor	Dokter Spesialis Specialized Doctor	Dokter Gigi Dentist	Perawat Nurse	Bidan Midwife
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Minas	5	0	2	23	32
Sungai Mandau	4	0	0	20	29
Kandis	7	0	2	20	37
Siak	7	0	2	38	34
Kerinci Kanan	5	0	1	23	23
Tualang	5	0	6	48	56
Dayun	5	0	2	22	23
Lubuk Dalam	5	0	1	21	22
Koto Gasib	3	0	1	19	31
Mempura	3	0	1	22	33
Sungai Apit	5	0	1	28	58
Bunga Raya	4	0	1	21	29
Sabak Auh	6	0	1	14	22
Pusako	4	0	0	9	20
<b>Kabupaten Siak</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>483</b>	<b>554</b>

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2024 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak)

Setelah menentukan lokasi, Bupati dan Wakil Bupati Siak melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan pemerintah kampung untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif sebelum pelaksanaan program. Tahapan berikutnya adalah sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media seperti grup *WhatsApp* kampung, baliho, agar masyarakat mengetahui jadwal serta jenis layanan yang akan diberikan. Selain itu, sebelum pelaksanaan program, dilakukan diskusi secara berkala terhadap hasil layanan sebelumnya untuk menyesuaikan strategi dan memperbaiki aspek yang masih kurang efektif. Evaluasi ini mencakup analisis jumlah pasien yang dilayani, efektivitas layanan yang diberikan, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan program.

Bupati dan Wakil Bupati Siak menentukan prioritas dan tahapan pelaksanaan program Bujang Kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kesiapan tenaga medis dan fasilitas juga menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan program ini. Koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kampung turut memastikan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

#### 4. Tindakan (*Actions*) dalam Program Bujang Kampung

Setelah menetapkan tujuan dan arah, langkah selanjutnya adalah sebuah tindakan. Mulgan (2009) menjelaskan bahwa pemerintah harus menerapkan strategi melalui kebijakan, peraturan, atau program yang konkret. Selain itu, kepemimpinan yang inspiratif juga diperlukan untuk membangun dukungan dan memastikan strategi dapat berjalan dengan baik.

Untuk memastikan kelancaran program Bujang Kampung, Pemerintah Kabupaten Siak pada akhir tahun 2023 menyusun Peraturan Bupati (Perbup) No. 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan

Pelayanan Publik melalui Program Bujang Kampung (Bupati kerja dan Ngantor di Kampung), yang disahkan pada 6 Januari 2024. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang memastikan bahwa program dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Selain kebijakan formal, strategi konkret juga diterapkan melalui komunikasi yang intensif antara Bupati dan Wakil Bupati Siak, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat. Komunikasi ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk koordinasi teknis antar-OPD, tetapi juga dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami tujuan dan manfaat dari program ini.

**Gambar 4. Kegiatan Komunikasi Intensif Program Bujang Kampung**



Sumber: Instagram @prokopim\_siak

Selanjutnya, tindakan lain yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan program yakni waktu program bujang

kampung yang terbatas yaitu hanya dilaksanakan satu hari di hari kerja yakni hari Jumat dan saat itu juga pendaftarannya agar tidak begitu panjang dibatasi yaitu ditutup pada pukul 14:00 WIB yang mana jam kerja hingga pukul 16:00 WIB, serta minimnya tenaga medis berupa jenis dokter spesialis yang sedikit yakni 2-3 jenis saja sedangkan Kabupaten Siak berada dalam kondisi tinggi angka Ineksi Pernapasan Saluran Atas (ISPA) dan Demam Berdarah Dengue (DBD), telah memiliki tindakan baru yakni pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Siak menjawab tantangan tersebut dengan dibentuknya inovasi lanjutan yakni Siak Melayani Kesehatan Masyarakat (Siak Melesat) yaitu layanan kesehatan gratis secara bergilir pada setiap kampung di Kabupaten Siak yang terlaksana setiap hari Sabtu dengan sepuluh jenis layanan kesehatan dan sepuluh jenis dokter spesialis, tentunya hal ini menjawab tantangan yang ada pada program Bujang Kampung. Inovasi lanjutan ini terlaksana pada hari libur, yang mana masyarakat yang tadinya sulit mengakses program Bujang Kampung yang berjalan pada hari Jumat yakni hari kerja dapat mengakses inovasi lanjutan ini, dengan layanan kesehatan yang lebih lengkap lagi. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Siak (2021-2025) Bapak Drs. H. Alfedri, M.Si, yakni:

*“Maka pelayanan kesehatan ini kemudian 2024 yang lalu mulai Januari kita dekatkan lagi pelayanan kesehatan ini namanya Siak Melesat yakni Siak Melayani Kesehatan Masyarakat, membawa dokter spesialis sepuluh orang ke desa-desa gratis itu”* (Wawancara 26 Maret 2025).

Sebelum adanya Siak Melesat penyuluhan kesehatan sudah mulai digencarkan pada tahun 2023, dan terus mengingatkan pihak kampung untuk melihat kebutuhan masyarakatnya, kemudian dengan adanya Siak Melesat

membuat kemajuan dalam upaya penurunan dan pencegahan ISPA dan DBD lebih lanjut, dikarenakan pada inovasi ini telah membawa dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dokter spesialis THT yang sering berhubungan dengan penyakit tersebut. Selanjutnya mengenai Kabupaten Siak yang menghadapi tantangan kesehatan yang cukup besar akibat meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2023.

**Gambar 5. Poster Kegiatan Siak Melesat**



Sumber: Majalah Outsiders

Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati

Siak melalui Dinas Kesehatan berupaya mengintegrasikan edukasi kesehatan dalam setiap pelaksanaan program Bujang Kampung, dengan memberikan sosialisasi mengenai cara hidup sehat dan upaya pencegahan penyakit.

Selain itu, Perangkat Kampung diminta oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk proaktif dalam memantau kondisi kesehatan masyarakatnya, sehingga Bupati dan Wakil Bupati Siak dapat merespons dengan menghadirkan dokter spesialis yang sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi Bujang Kampung. Dengan strategi ini, Bupati dan Wakil Bupati Siak berharap angka kasus ISPA dan DBD dapat ditekan, serta masyarakat lebih siap menghadapi tantangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan di Kabupaten Siak.

Selain tindakan tersebut, dokumen inovasi program Bujang Kampung tahun 2024 mencatat beberapa strategi baru yang dikembangkan pada tahun 2023, yaitu:

- a. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelayanan kampung, seperti rakor dalam program Bujang Kampung.
- b. Penerapan teknologi lokal seperti aplikasi *mobile* untuk mempermudah akses informasi layanan (seperti *web* Mal Pelayanan Publik Kabupaten Siak).
- c. Pengembangan model pelayanan terpadu, di mana berbagai layanan dikombinasikan dalam satu sistem yang lebih efisien (seperti memperkenalkan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Siak yang akan mulai beroperasi awal tahun 2024).
- d. Integrasi layanan kesehatan dalam satu platform, sehingga masyarakat mendapatkan solusi kesehatan yang lebih holistik (*web* satu sehat *mobile*).
- e. Pelayanan tambahan, seperti pelayanan KB dan Catin, yang mulai diterapkan sejak tahun 2023.

Kemudian pada tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Siak mendapatkan mitra baru yakni keterlibatan CSR perusahaan, seperti PT BSP yang memberikan 16 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kelurahan Tualang dan PT RAPP yang mendistribusikan 21 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan pangan lokal di Kampung Sengkemang. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak yakni memberikan undangan terhadap Perseroan Terbatas yang terdapat pada lokasi terdekat saat akan terlaksananya program Bujang Kampung, sehingga jika terdapat ketertarikan pihak perseroan tersebut maka strategi Pemerintah Kabupaten sukses untuk mendapatkan mitra baru. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Siak (2021-2025) Bapak Drs. H. Alfredri, M.Si, sebagai berikut:

*“...terkait dengan swasta dimanapun program Bujang Kampung ya kita undang umpamanya ada persoalan-persoalan kemitraan CSR, macam-macam itu juga swasta ikut Bujang Kampung.”*  
(Wawancara 26 Maret 2025).

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Siak juga berupaya membangun dukungan dan motivasi bagi OPD kesehatan agar tetap berkomitmen dalam menjalankan program Bujang Kampung. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Siak juga memastikan bahwa kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan seluruh puskesmas berjalan dengan baik.

## **5. Pembelajaran (*Learning*) dalam Program Bujang Kampung**

Strategi yang baik memiliki pembelajaran. Mulgan (2009) menyatakan bahwa pembelajaran dalam strategi pemerintahan bukan hanya tentang mengevaluasi apakah suatu tindakan berhasil atau gagal. Lebih dari itu, pembelajaran berarti pemerintah harus terus berpikir apakah tujuan awal, cara menganalisis masalah, dan arah kebijakan

masih relevan atau perlu diperbaiki. Jika ada perubahan situasi atau cara yang lebih efektif, maka strategi harus disesuaikan agar tetap bermanfaat bagi masyarakat.

Evaluasi merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan atau kegagalan program Bujang Kampung. Bupati dan Wakil Bupati Siak menggunakan berbagai metode evaluasi, termasuk survei kepuasan masyarakat khusus untuk pelaksanaan program Bujang Kampung dan sistem pelaporan online yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan atau saran terkait pelayanan yang diterima. Selain itu juga, bekerja sama dengan lembaga independen seperti Ombudsman untuk menilai sejauh mana program ini memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Evaluasi ini dilakukan secara berkala dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk umpan balik masyarakat, laporan dari perangkat kampung, serta hasil observasi langsung di lapangan. Dengan adanya sistem evaluasi ini, Bupati dan Wakil Bupati Siak dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan program sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depan.

Selanjutnya, agar tujuan awal program tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati Siak menerapkan pendekatan berbasis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (*Planning, Organizing, Executing, Controlling*). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tetap berjalan sesuai dengan kebijakan awal dan dapat beradaptasi dengan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Kemudian, evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi dasar bagi Bupati dan Wakil Bupati Siak untuk merancang perubahan kebijakan dan strategi baru dalam program Bujang Kampung. Salah satu langkah yang diambil adalah mengalokasikan anggaran secara prioritas untuk memastikan kelangsungan program, serta mendorong partisipasi masyarakat

dan perangkat kampung dalam pelaksanaan layanan.

Selanjutnya, jika strategi yang diterapkan dalam program Bujang Kampung masih belum cukup efektif, mereka memiliki upaya untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Prinsip ini diterapkan agar program tetap dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Siak juga memahami bahwa meskipun program telah berjalan dengan baik, selalu ada ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan refleksi terhadap pelaksanaan program dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas layanan yang diberikan. Hal ini selaras dengan pernyataan oleh Wakil Bupati H. Husni Merza, BBA., MM yang menyatakan bahwa:

*“Ouh iya itu betul sekali kita terus berpikir continue improvement jadi peningkatan yang terus berkelanjutan jelas kita terus berpikir apa yang kita lakukan hari ini mungkin sudah baik tapi masih ada yang lebih baik yang harus kita lakukan dengan cara-cara yang lebih baik lagi untuk memastikan bahwa program-program kita kedepannya semakin baik semakin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.”* (Wawancara 20 Februari 2025).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Siak memiliki komitmen untuk terus memperbaiki program Bujang Kampung agar lebih adaptif dan inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan strategi yang semakin berkembang, program Bujang Kampung diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Siak.

## **E. KESIMPULAN**

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak menerapkan berbagai strategi, yakni pada akhir tahun 2023 menyusun Peraturan Bupati (Perbup) No. 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung) yang disahkan pada 6 Januari 2024, menerapkan komunikasi intensif (antar Bupati dan Wakil Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat) dalam bentuk sosialisasi, anggaran yang mulai disiapkan dengan lebih baik oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dibentuknya inovasi lanjutan yakni Siak Melayani Kesehatan Masyarakat (Siak Melesat), berupaya mengintegrasikan edukasi kesehatan setiap pelaksanaan program Bujang Kampung dengan memberikan sosialisasi mengenai cara hidup sehat dan upaya pencegahan penyakit, Perangkat Kampung juga diminta oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk proaktif dalam memantau kondisi kesehatan masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Siak (Bupati dan Wakil Bupati) juga memberikan undangan terhadap Perseroan Terbatas yang terdapat pada lokasi terdekat saat akan terlaksananya program Bujang Kampung.

Kemudian, dokumen inovasi program Bujang Kampung tahun 2024 mencatat beberapa strategi baru yang dikembangkan pada tahun 2023, yakni: pertama, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelayanan kampung, seperti rakor dalam program Bujang Kampung; kedua, penerapan teknologi lokal seperti aplikasi mobile untuk mempermudah akses informasi layanan (seperti web Mal Pelayanan Publik Kabupaten Siak); ketiga, pengembangan model pelayanan terpadu, di mana berbagai layanan dikombinasikan dalam satu sistem yang lebih efisien (seperti memperkenalkan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Siak yang akan mulai beroperasi awal tahun 2024); keempat,

integrasi layanan kesehatan dalam satu platform, sehingga masyarakat mendapatkan solusi kesehatan yang lebih holistik; dan kelima, pelayanan tambahan, seperti pelayanan KB dan Catin, yang mulai diterapkan sejak tahun 2023.

Selanjutnya, agar tujuan awal program tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati Siak menerapkan pendekatan berbasis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (*Planning, Organizing, Executing, Controlling*). Jika strategi yang diterapkan dalam program Bujang Kampung masih belum cukup efektif, Bupati dan Wakil Bupati Siak memiliki upaya untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

## F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas program Bujang Kampung dalam pelayanan kesehatan: Pemerintah Daerah Kabupaten Siak perlu meningkatkan fasilitas kesehatan dengan menyediakan lebih banyak peralatan medis, ambulans, dan obat-obatan di setiap lokasi pelayanan, menambah jumlah tenaga medis terutama dokter spesialis, serta memperbaiki akses jalan menuju lokasi. Sosialisasi program juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih memahami jadwal dan jenis layanan yang tersedia, misalnya dengan memberikan dana tambahan kepada pihak kampung untuk berkeliling menggunakan mobil dan alat pengeras suara pada H-1 program, sehingga masyarakat yang berjarak jauh dan tidak memiliki handphone dapat mengetahui jadwal pelaksanaan program Bujang Kampung. Selain itu, strategi pencegahan penyakit perlu diperkuat dengan memasukkan edukasi kesehatan, kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta pemeriksaan kesehatan berkala dalam program, disertai peningkatan koordinasi pemerintah dengan instansi terkait untuk mengurangi faktor risiko penyakit di

masyarakat.

Untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian pada pelayanan kependudukan, dikarenakan pelayanan tersebut memiliki pengunjung yang paling ramai pada program Bujang Kampung, juga direkomendasikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Siak. Selain itu juga dapat meneliti pada pelayanan sosial, pelayanan yang mengurus pendataan masyarakat tidak mampu dan sejenisnya, pelayanan ini membantu masyarakat dalam menghadapi kendala-kendala ketika menerima sebuah bantuan. Dengan adanya saran dan perbaikan tersebut, diharapkan program Bujang Kampung dapat lebih efektif untuk masyarakat Kabupaten Siak.

#### DAFTAR PUSTAKA Buku:

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Rajawali Pers.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Anjani, J., Permatasari, M. N., Irawan, H., Kurniawati, A., Simangunsong, T., Hutabarat, P. U. B., Nurchamidah, Safingah, K., Mardika, H. P. K., Setiyaningsih, L., & dkk. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Anam (Strategi, Model, dan Inovasi untuk Transformasi Sosial)*. CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Haboddin, M., & Arswendi, R. (2022). *Kepemimpinan Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press UB Press.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Lasiyono, U., & Alam, W. Y. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Mega Press Nusantara.
- Marwiyah, S. (2023). *Strategi dalam*

*Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi*. CV Mitra Ilmu.

- Muhammad, S. (2020). *Strategi Pemerintahan; Manajemen Organisasi Publik*. Penerbit Erlangga.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*. Oxford University Press.
- Noer, R. M., et al. (2021). *Strategi dalam Menghadapi Tantangan Kesehatan Pasca Pandemi Covid-19*. Penerbit Insania.
- Rosramadhana, & Simanjuntak, B. A. (2018). *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rukin. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. CV Jakad Media Publishing.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.
- Syafi'ie, I. K. (2021). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Silitonga, J. T. P., Utama, L. S., & Yuliani, D. P. (2020). *Kepemimpinan Pemerintahan dalam Penerapan Diskresi Inovasi Daerah*. Amerta Media.

#### Artikel Jurnal:

- Anam, K. (2019). *Strategi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara*. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(3), 1–11.
- Farhan, A. (2023). *Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Matra Pembaruan*, 7(2), 111–123.
- Indriyany, I. A. (2019). *Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan?*. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 1(1), 1–13.
- Lestari & Puspadari. (2023). *Strategi Pemerintah Desa dari Berbagai Tingkat Cakupan Peserta Menuju*

- UHC di Kabupaten Karimun. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 3(10), 1689-1701.
- Marston, C., Renedo, A., & McGowan, C. R. (2016). *Effects of community participation on improving uptake of family planning services in low- and middle-income countries: A systematic review. Health Policy and Planning*, 31(9), 1237-1251.
- Pratama, R. (2024). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Melalui Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cianjur Tahun 2023. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-13.
- Putri, M. D., Adnan, M., & Herawati, N. R. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2015. *Journal of Politics and Government Studies*, 6(1), 1-13.
- Rusadi, S., & Wedayanti, M. D. (2019). Strategi City Branding oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Peningkatan Daya Tarik Pariwisata. *WEDANA: Jurnal Pemerintahan Politik Dan Birokrasi*, 5(2), 16-21.
- Sinuhaji, Ferdinand. (2015). Model Epidemio Sirs Dengan Time Delay. *Visipena*, 6(1), 77-88.
- Wilanda, et al. (2024). Efektivitas Intervensi Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan Primer di Wilayah Terpencil: Sebuah Studi Bibliometrik. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(10), 1689-1701.
- Pendapatan Asli Desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 2(2).
- Website:**
- Antara. (2022). Polusi Udara dari Asap Pabrik Sawit Meresahkan Warga Siak. Medcom.Id. [https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybJWYBjk-polusi-udara-dari-asap-pabrik-sawit-meresahkan-warga-siak?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybJWYBjk-polusi-udara-dari-asap-pabrik-sawit-meresahkan-warga-siak?utm_source=chatgpt.com)
- Arizal. (2022). Bujang Kampung Laksamana Mampu Tangani 500 Pengurusan. Harianriau.Co. <https://harianriau.co/amp/detail/60527/bujang-kampung-laksamana-mampu-tangani-500-pengurusan>
- Inforiau. (2022). Program Bujang Kampung, Upaya Selesaikan Masalah dan Pengembangan Potensi di Siak. Inforiau.Co. <https://www.inforiau.co/news/read/program-bujang-kampung-upaya-selesaikan-3336383735>
- Majalahoutsiders.com. (2024). Bupati Siak Boyong 10 Dokter Spesialis Program Melesat. <https://www.majalahoutsiders.com/2024/07/26/bupati-siak-boyong-10-dokter-spesialis-diprogram-melesat/>
- Media Center Riau. (2022). DBD Meningkat, pemprov Riau Minta Puskesmas Segera Beri Penyuluhan. Mediacyter.Riau.Go.Id. <https://mediacyter.riau.go.id/amp/read/73786/dbd-meningkat-pemprov-riau-minta-puskesmas-se>
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Provinsi Riau. (2023). Kadiskes: Hingga Agustus 2023, Kasus ISOA di Riau Tercatat 31.093. Ppid.Riau.Go.Id. <https://ppid.riau.go.id/berita/10954/kadiskes-hingga-agustus-2023-kasus-isoa-di-riau-tercatat-31-093-kasus>
- Pemerintah Kabupaten Siak. (2024). Bujang Kampung ke 117 Alfredri Harap Pelayanan Makin Hari Makin Baik. [https://www.siakkab.go.id/Serahkan\\_SHM\\_TORA\\_Bupati\\_Alfedri\\_Untuk\\_Pemberdayaan\\_Ekonomi\\_Masyarakat240917110248](https://www.siakkab.go.id/Serahkan_SHM_TORA_Bupati_Alfedri_Untuk_Pemberdayaan_Ekonomi_Masyarakat240917110248)
- Rasyid, A. (2023). Ombudsman RI Apresiasi Program Bujang Kampung Hanya Dua di Indonesia. Diskominfo.Siakkab.Go.Id.

<https://diskominfo.siakkab.go.id/ombudsman-ri-apresiasi-program-bujang-kampung-hanya-dua-di-indonesia>

Riautelevi.com. (2023). Ombudsman RI Apresiasi Program Bujang Kampung.

[www.riatelevi.com/berita-ombudsman-ri-apresiasi-program-bujang-kampung.html](https://www.riatelevi.com/berita-ombudsman-ri-apresiasi-program-bujang-kampung.html)

Wangge, M. (2024). Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Warga Terjangkit DBD Selama 2023 di Riau. Porosjakarta.Com.

<https://www.porosjakarta.com/nusantara/amp/063722589/seribu-tujuh-ratus-empat-puluh-dua-warga-terjangkit-dbd-selama-2023-di-riau>

#### **Peraturan-Peraturan:**

Keputusan Bupati Siak Nomor 207/HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Kegiatan Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bupati Siak Tahun 2022

Keputusan Bupati Siak Nomor 764/HK/KPTS/2021 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bupati Siak Tahun 2022

Keputusan Bupati Siak Nomor 790/HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Tim Pelaksana Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bupati Siak Tahun 2023

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor 97/DPMK/KPTS/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Bujang Kampung (Bupati dan Wakil Bupati Bekerja

dan Berkantor di Kampung) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bupati Siak Tahun 2022

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

#### **Sumber Lainnya:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. (2024). Kabupaten Siak dalam Angka Siak *Regency In Figure* 2024. BPS Kabupaten Siak.

Dokumen Inovasi Bujang Kampung (Bupati dan Wakil Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung) tahun 2024

Laporan Kegiatan Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bupati Siak oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak tahun 2022

Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023.